



ANALISIS SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL DAN AUDIT INTERNAL DALAM UPAYA PENCEGAHAN FRAUD (KECURANGAN)

Windah Lestari, Sulaeman, Idang Nurodin

Universitas Muhammadiyah Sukabumi

windahtari.xak1@gmail.com

sulaeman1342@ummi.ac.id

idangnurodin@ummi.ac.id

Abstrak

Industri distribusi di Indonesia menghadapi tantangan besar dalam pengendalian internal akibat kompleksitas operasional yang melibatkan multi-channel distribution, supply chain management, dan cash flow yang tinggi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kinerja sistem pengendalian internal dalam mencegah fraud pada perusahaan distribusi serta mengidentifikasi celah-celah yang berpotensi menimbulkan tindak kecurangan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus pada PT. XYZ, perusahaan distribusi consumer goods yang memiliki banyak cabang yang tersebar di Indonesia. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dengan beberapa informan kunci dan berdasar pengamatan kegiatan distribusi di lapangan. Data sekunder diperoleh dari beberapa campaign dan standard operating procedures (SOP). Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal PT. XYZ memiliki lima komponen utama sesuai framework COSO, namun implementasinya masih belum optimal. Penelitian mengidentifikasi beberapa celah fraud yang berpotensi merugikan perusahaan seperti akses sistem yang tidak terbatas untuk beberapa pengguna, lemahnya pengawasan pada saat proses stock opname toko konsinyasi, dan kurang adanya pemisahan antara pekerjaan dengan hubungan sosial di beberapa divisi. Penelitian merekomendasikan implementasi sistem pengendalian internal yang terintegrasi dengan teknologi, penguatan sistem monitoring real-time, pembentukan unit audit internal yang independen, dan pengembangan budaya anti-fraud melalui program edukasi berkelanjutan.

Kata kunci: Pengendalian Internal, Fraud Prevention, Perusahaan Distribusi, Kualitatif Deskriptif, COSO Framework.

Abstract

Distribution industry in Indonesia faces major challenges in internal control due to operational complexity involving multi-channel distribution, supply chain management, and high cash flow. This study aims to analyze the performance of the internal control system in preventing fraud in distribution companies and identify gaps that have the

potential to cause fraud. This research uses a descriptive qualitative method with a case study approach at PT. XYZ, a consumer goods distribution company that has many branches spread across Indonesia. Data collection techniques were conducted through in-depth interviews with several key informants and based on observations of distribution activities in the field. Secondary data was obtained from several campaigns and standard operating procedures (SOP). The results showed that the internal control system of PT XYZ has five main components according to the COSO framework, but its implementation is still not optimal. The research identified several fraud gaps that could potentially harm the company such as unlimited system access for some users, weak supervision during the consignment store stock-taking process, and lack of separation between work and social relationships in several divisions. The study recommends the implementation of a technology-integrated internal control system, strengthening the real-time monitoring system, establishing an independent internal audit unit, and developing an anti-fraud culture through continuous education programs.

Keywords: Internal Control, Fraud Prevention, Distribution Company, Descriptive Qualitative, COSO Framework.

1. Pendahuluan

Dalam dunia bisnis yang semakin kompetitif, reputasi dan keberlangsungan suatu perusahaan sangat bergantung pada sistem pengendalian internal dan efektivitas pengelolaan sumber daya yang ada. Perkembangan ekonomi yang sangat pesat dan adanya kompleksitas transaksi keuangan yang semakin meningkat menuntut perusahaan untuk memiliki sistem pengendalian internal yang kuat yang mana berperan sebagai mekanisme strategis yang dirancang guna memastikan tingkat keyakinan yang cukup dalam perwujudan tujuan organisasi pada tiga aspek fundamental kredibilitas laporan keuangan, ketakutan terhadap regulasi maupun ketentuan hukum yang berlaku, serta optimasi kinerja operasional secara efektif serta efisien.

Salah satu indikator perusahaan dikatakan baik dapat tercermin dari proses berjalannya sistem pengendalian internal yang dimiliki perusahaan. Pada dasarnya hal ini sebagai suatu gagasan atau ide-ide pokok yang dirancang agar dapat dimanfaatkan untuk mengamankan aset-aset perusahaan seperti aktiva dan data perusahaan, serta untuk mengevaluasi kinerja karyawan perusahaan. Dengan adanya sistem pengendalian internal pada suatu perusahaan diharapkan semua proses pekerjaan bisa berjalan sesuai prosedur dan aturan yang berlaku agar tujuan perusahaan dapat tercapai.



Pengendalian internal saat ini sudah hal wajib yang harus dimiliki oleh perusahaan. Namun dalam suatu sistem pengendalian internal perusahaan masih saja banyak ditemukan celah untuk melakukan tindak penyelewengan atau kecurangan. Sistem pengendalian internal yang ada dan sudah berjalan pun harus terus menerus diperbarui mengikuti perkembangan zaman yang semakin maju. Karena jika dilihat dengan berbagai fenomena yang terjadi, semakin lama celah *fraud* itu bisa memanfaatkan teknologi yang semakin canggih. Kecurangan atau *fraud* harus dicegah dari hal-hal kecil disekitar kita. *Fraud* sebagai permasalahan yang lazim terjadi dalam dunia usaha serta umumnya tidak terdeteksi secara langsung, sehingga dapat mengancam stabilitas perusahaan. Meskipun banyak organisasi menyatakan terbebas dari praktik kecurangan, pada kenyataannya hampir tidak ada lembaga yang sepenuhnya lepas dari potensi risiko *fraud* (Rahmatika, 2020).

Perusahaan distribusi berperan krusial dalam menjembatani produsen dan konsumen, dengan alur barang dan dokumen yang cepat, kompleks, dan sering kali tersebar di berbagai wilayah. Dalam proses tersebut, perusahaan distribusi menghadapi tantangan besar dalam menjaga integritas operasional, khususnya terkait dengan risiko *fraud* yang dapat terjadi pada berbagai lini, mulai dari manipulasi data penjualan, penyimpangan stok barang, penggelapan kas, hingga kolusi antara petugas lapangan dan pelanggan.

Dengan jaringan yang luas, volume transaksi yang tinggi, dan pergerakan inventaris yang konstan, perusahaan distribusi secara inheren menghadapi berbagai risiko operasional dan *financial*. Salah satu risiko paling merusak yang mengancam integritas dan keberlanjutan bisnis di sektor ini adalah *fraud* (kecurangan). *Fraud* dalam konteks perusahaan distribusi tidak hanya terbatas pada pencurian fisik, tetapi juga mencakup serangkaian tindakan penipuan yang kompleks, memanfaatkan celah dalam sistem, proses, dan bahkan kepercayaan.

Sifat dasar bisnis distribusi, yang melibatkan banyak titik sentuh, mulai dari pengadaan barang dari vendor, pengelolaan gudang, proses penjualan, pengiriman kepada pelanggan, hingga penanganan keuangan, semua ini menawarkan berbagai peluang bagi pelaku *fraud*. Menariknya, banyak perusahaan distribusi di Indonesia masih mengandalkan sistem pengendalian internal yang bersifat statis dan tidak berbasis risiko. Sistem pengawasan yang dijalankan kerap terfokus pada aspek administratif, seperti pelaporan tertulis dan pencocokan dokumen, tanpa mempertimbangkan potensi penyimpangan yang terjadi di lapangan, misalnya saat proses pengiriman barang, retur, hingga pencatatan piutang. Celah inilah yang menjadi ladang subur bagi *fraud* yang sulit terdeteksi sejak awal.

Fraud dalam perusahaan distribusi umumnya tidak bersifat kasuistik, melainkan sistematis dan berulang karena lemahnya pemisahan fungsi, kurangnya rotasi tugas, serta pengawasan yang hanya dilakukan secara berkala. Sering kali, *fraud* baru



terungkap saat audit akhir tahun atau ketika kerugian sudah signifikan. Hal ini menunjukkan adanya kelemahan mendasar dalam desain dan pelaksanaan pengendalian internal yang tidak selaras dengan realitas operasional. Namun peneliti meyakini dengan dilakukannya *improvement* atau perbaikan secara terus menerus dapat berpengaruh positif dalam menekan potensi terjadinya *fraud*, dapat mendeteksi dini dan mengurangi kemungkinan celah *fraud* yang bisa dimanfaatkan. Banyak celah *fraud* bermunculan namun banyak juga cara yang dapat kita lakukan untuk mencegah dan mengurangi dampak negatif yang akan muncul setelahnya.

Fraud dalam konteks distribusi memiliki karakteristik unik, sering kali melibatkan kerjasama lintas fungsi, seperti bagian gudang, *sales*, dan *finance*, sehingga pengungkapan kasus menjadi lebih kompleks. Dalam praktiknya, banyak *fraud* yang terjadi bukan karena tidak adanya sistem pengendalian, melainkan karena lemahnya implementasi dan kurangnya pemahaman pegawai terhadap fungsi kontrol itu sendiri. Tantangan dalam mendeteksi *fraud* ini diperparah oleh beberapa faktor esensial. Pertama, volume data yang ekstrem yang dihasilkan setiap hari oleh perusahaan distribusi membuat deteksi manual hampir mustahil. Menganalisis ribuan hingga jutaan baris data transaksi untuk mencari anomali adalah tugas yang cukup berat. Kedua, sifat tersembunyi dari banyak skema *fraud* memerlukan analisis yang jauh melampaui audit tradisional, pelaku sering kali pandai menyembunyikan jejak mereka di antara transaksi yang sah.

Apabila struktur pengendalian internal dalam perusahaan tidak memadai, maka potensi terjadinya kesalahan maupun praktik kecurangan menjadi lebih besar. Sebaliknya, penerapan sistem pengendalian internal yang kuat mampu menekan peluang terjadinya penyimpangan tersebut. Bahkan dalam situasi dimana penyimpangan tetap muncul, mekanisme pengendalian yang efektif memungkinkan deteksi dini sehingga langkah korektif dapat segera dilakukan secara tepat waktu. Selalu meng-*upgrade* pengetahuan dan kemampuan mengikuti perkembangan teknologi merupakan salah satu kunci bisa kita bisa menciptakan inovasi pencegahan *fraud* yang efektif dan *update*.

Sesuai dengan fenomena dan masalah yang telah dijelaskan sebelumnya, maka penting untuk menganalisis secara mendalam bagaimana sistem pengendalian internal serta audit internal dapat berperan sebagai mekanisme pencegahan *fraud* yang efektif. Mengingat pentingnya topik ini dalam konteks tata kelola perusahaan yang baik dan perlindungan *stakeholder*, serta dengan mempertimbangkan berbagai kasus *fraud* yang telah terjadi di Indonesia, maka penelitian dengan judul "Analisis Sistem Pengendalian Internal dan Audit Internal dalam Upaya Pencegahan *Fraud* (Kecurangan)" menjadi relevan dan penting untuk dilakukan.



2. Kajian Pustaka

2.1 Sistem

Sistem merupakan kumpulan elemen yang saling terhubung satu sama lain. Sistem secara umum merupakan suatu kesatuan yang terdiri dari unsur atau elemen yang saling berhubungan untuk memperlancar aliran informasi, bahan, atau energi dalam rangka mencapai satu tujuan. Kata sistem berasal dari istilah *systema* dalam bahasa Yunani, yang berarti kumpulan elemen atau komponen yang saling terhubung secara teratur dan membentuk suatu kesatuan. Berikut merupakan klasifikasi sistem yang ada :

a. Berdasar Keterbukaan

- 1) Sistem Terbuka, sistem yang terkait dan dipengaruhi oleh lingkungan sekitarnya.
- 2) Sistem Tertutup, sistem yang terkait dan dipengaruhi oleh lingkungan sekitarnya.

b. Berdasar Alamiah

- 1) Sistem Alam, suatu sistem yang terbentuk melalui proses-proses alami.
- 2) Sistem yang diciptakan oleh manusia, sistem buatan manusia.

2.2 Pengendalian Internal

Analisis pengendalian internal dalam upaya pencegahan *fraud* (kecurangan) melibatkan evaluasi sistem pengendalian yang ada untuk mengidentifikasi kelemahan yang dapat dimanfaatkan untuk tindakan curang. Pengendalian internal merupakan suatu mekanisme sistematis yang dirancang untuk memberikan keyakinan yang cukup terhadap pencapaian tujuan organisasi, terutama dalam hal efisiensi dan efektivitas operasional, keandalan laporan keuangan, serta kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku.. Implementasi sistem pengendalian internal yang optimal mempunyai peranannya yang strategis dalam mengantisipasi serta mengidentifikasi secara dini potensi kesalahan maupun tindakan kecurangan dalam lingkup perusahaan. Penelitian terkini menunjukkan bahwa lingkungan pengendalian merupakan elemen yang paling penting dalam struktur pengendalian internal, dimana penurunan kualitas lingkungan pengendalian dapat mengurangi keandalan keseluruhan sistem pengendalian internal (O'Leary et al., 2006). Sehubungan dengan hal tersebut, Arens (2017) mengemukakan beberapa tujuan utama dari pengendalian internal, diantaranya meliputi :

- a. Realibilitas pelaporan keuangan
- b. Efisiensi dan efektifitas operasi
- c. Ketaatan pada hukum dan peraturan



Merujuk pada pendapat sebelumnya, dapat disimpulkan bahwasanya sistem pengendalian internal mempunyai tiga fokus utama yang dijabarkan di antaranya meliputi:

- 1) Tujuan operasional, yakni memastikan bahwasanya seluruh aktivitas perusahaan berjalan secara efektif maupun efisien. Dalam hal ini, pengendalian internal berfungsi sebagai alat guna mengoptimalkan penggunaan sumber daya serta mengendalikan biaya operasional agar mendukung pencapaian sadaran strategis organisasi.
- 2) Tujuan pelaporan, yang berkaitan dengan peningkatkan keandalan maupun akurasi data akuntansi serta laporan keuangan. Pengendalian internal di sini bertujuan untuk memastikan bahwa informasi yang disampaikan dalam laporan dapat dipercaya, tidak membingungkan, serta dapat diverifikasi kebenarannya oleh pihak yang berkepentingan.
- 3) Tujuan kepatuhan, yakni mendorong maupun memastikan bahwasanya organisasi mematuhi seluruh ketentuan hukum, peraturan yang berlaku, serta kebijakan internalnya. Hal tersebut dirancang guna menumbuhkan budaya taat aturan yang konsisten dengan kerangka regulasi eksternal dan internal.

2.3 Pengendalian Internal Dalam Konteks Distribusi

Dalam konteks industri distribusi, pengendalian internal menghadapi tantangan yang unik karena kompleksitas *supply chain*, volume transaksi yang tinggi, dan distribusi geografis yang luas. Penelitian menunjukkan bahwa perusahaan distribusi memerlukan pendekatan pengendalian internal yang lebih dinamis dan berbasis risiko untuk mengatasi berbagai celah *fraud* yang dapat muncul di berbagai titik dalam rantai distribusi (Špiler et al., 2024).

2.4 Komponen Pengendalian Internal COSO

Model kerangka kerja COSO atau kerangka kerja pengendalian internal yang terintegrasi menjelaskan lima komponen dasar dalam sistem pengendalian internal yang perlu diterapkan untuk mengurangi risiko terjadinya kecurangan. Komponen pengendalian COSO mencakup aspek-aspek berikut ini :

a. Lingkungan pengendalian

Lingkungan pengendalian berperan sebagai naungan bagi keempat komponen yang lain. Agar dapat memahami dan mengevaluasi lingkungan pengendalian, auditor perlu memperhatikan sub-komponen pengendalian yang paling krusial, yaitu;

- 1) Nilai-nilai etis dan integritas
- 2) Komitmen kepada kompetensi
- 3) Partisipasi komite audit atau dewan komisaris
- 4) Gaya operasi manajemen dan filosofi



- 5) Struktur organisasi
 - 6) Praktik sumber daya manusia dan kebijakan
- b. Penilaian risiko
- Proses pengenalan dan penilaian risiko yang berhubungan dengan pencapaian sasaran organisasi. Dalam konteks pencegahan *fraud*, penilaian risiko membantu organisasi untuk mengidentifikasi area-area yang rentan terhadap kecurangan dan mengembangkan strategi mitigasi yang tepat (Nyakarimi et al., 2020).
- c. Aktivitas pengendalian
- Aturan dan langkah-langkah yang mendukung kepastian bahwa tindakan yang diperlukan telah dilakukan untuk mengatasi risiko. Penelitian menunjukkan bahwa aktivitas pengendalian yang efektif, termasuk aturan dan prosedur yang memastikan bahwa tindakan yang diperlukan telah diambil untuk menangani risiko dapat secara signifikan mengurangi peluang terjadinya *fraud* (Atmadja et al., 2024). Aktivitas pengendalian umum dibagi menjadi lima kategori yaitu:
- 1) Pembagian tugas yang cukup baik
 - 2) Otorisasi yang sesuai atas aktivitas dan transaksi
 - 3) Catatan dan dokumen yang cukup
 - 4) Pengawasan fisik terhadap catatan dan aset
 - 5) Penilaian kinerja secara mandiri
- d. Informasi dan komunikasi
- Tujuan sistem informasi dan komunikasi akuntansi dari entitas adalah untuk mencatat, memproses, dan melaporkan transaksi yang dilakukan serta mempertahankan akuntabilitas aktivitas terkait. Sistem yang memungkinkan organisasi untuk menangkap dan menukar informasi yang diperlukan untuk melaksanakan, mengelola, dan mengendalikan operasinya. Komunikasi yang efektif mengenai kebijakan anti-*fraud* terbukti dapat meningkatkan *awareness* dan pencegahan *fraud* (Ilias et al., 2024).
- e. Pemantauan
- Aktivitas pemantauan berhubungan dengan penilaian mutu pengendalian internal secara berkelanjutan atau periodik oleh manajemen untuk menentukan bahwa pengendalian itu telah beroperasi seperti yang diharapkan dan telah dimodifikasi sesuai dengan perubahan kondisi. Pemantauan berkelanjutan memungkinkan organisasi untuk mengidentifikasi defisiensi dalam pengendalian internal dan mengambil tindakan korektif yang diperlukan (Špiler et al., 2024).



2.5 Pengertian Kecurangan (*Fraud*)

Fraud merujuk pada perilaku ilegal yang melibatkan tindakan penipuan yang direncanakan dengan tujuan untuk menipu atau tidak jujur. Tindak pidana ini dapat berwujud dalam berbagai bentuk kejahatan ekonomi atau kejahatan kerah putih, seperti pencurian, penggelapan harta, manipulasi informasi, penggelapan kewajiban, penghilangan atau penyembunyian fakta, termasuk korupsi (Razaee and Riley, 2010).

Fraud hadir dengan bebagai macam modus yang tidak memandang siapapun dalam memberikan ancaman kepada perusahaan besar maupun kecil. Perusahaan besar bahkan skala internasional yang sudah menaati *rules of conduct* sekalipun tidak akan luput dari ancaman ini. Strategi yang bisa dilakukan dengan cara anti *fraud* antara lain dengan pencegahan, deteksi, investigasi, dan pemantauan. Contoh pilar pencegahan *fraud* yaitu, anti *fraud awareness* atau menumbuhkan kesadaran mengenai pentingnya pencegahan *fraud*, mengidentifikasi *fraud risk assessment* atau penaksiran risiko kecurangan, memperkuat sistem pengendalian internal, dan *whistleblower system* atau melaporakan kejadian *fraud*. Untuk mencegah atau mendeteksi tindakan *fraud*, pengendalian internal yang efektif perlu diterapkan. Namun, pengendalian internal yang lemah dapat meningkatkan risiko terjadinya *fraud*, sehingga dibutuhkan upaya tambahan dalam bentuk audit.

2.6 Teori *Fraud Triangle*



Gambar 2.1 *Fraud Triangle* (CPAs & Advisors, 2021)

Teori *Fraud Triangle* yang dikembangkan oleh Donald Cressey mengidentifikasi tiga kondisi yang diperlukan untuk terjadinya *fraud*: *pressure* (tekanan), *opportunity* (kesempatan), dan *rationalization* (rasionalisasi). Dalam konteks pengendalian internal, komponen *opportunity* menjadi fokus utama karena dapat dimitigasi melalui implementasi kontrol yang efektif (Suh et al., 2019).

- a. Intensif atau dorongan untuk melakukan tindakan *fraud* (*pressure*)

Faktor pendorong munculnya motif ini mempunyai kaitannya dengan kebutuhan *financial*, pola hidup yang tinggi, serta adanya tekanan dari pihak

luar yang memotivasi individu untuk melakukan tindakan curang. Dalam *Statement of Auditing Standards* (SAS) No. 99, disebutkan bahwasanya ada empat kondisi umum yang memicu tekanan, yakni ketidakstabilitas keuangan, target keuangan yang harus tercapai, tekanan eksternal, serta kebutuhan *financial* pribadi.

- b. Peluang atau kesempatan untuk melakukan *fraud (opportunity)*

Peluang untuk melakukan *fraud* sering kali muncul karena lemahnya sistem pengendalian internal, kewenangan yang terlalu luas diberikan kepada individu, kurangnya pelatihan maupun pengawasan yang memadai, minimnya tuntutan terhadap pelaku kecurangan, ketidakefektifan program serta kebijakan anti *fraud*, maupun juga budaya etis yang lemah dalam organisasi.

- c. Adanya tindakan merasionalkan perbuatan *fraud (rationalization)*

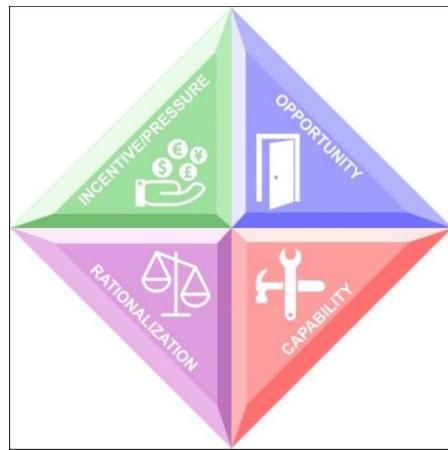
Rasionalisasi sebagai proses dimana pelaku kecurangan mencari alasan atau pembernanan untuk tindakannya sebelum melakukan *fraud*. Alasan ini menjadi motivasi guna melakukan kejahatan, dimana pelaku mungkin merasa bahwa tindakannya tidak melanggar hukum, meskipun secara etis tindakan tersebut jelas salah.

2.7 Teori Berlian *Fraud (Diamond Theory)*

Fraud Diamond Theory adalah salah satu teori yang digunakan untuk menjelaskan penyebab terjadinya kecurangan atau *fraud* dalam organisasi. Teori ini merupakan pengembangan dari *Fraud Triangle* yang awalnya dikemukakan oleh Donald Cressey. *Fraud Diamond* dikenalkan oleh Wolfe dan Hermanson pada tahun 2004, dengan menambahkan satu elemen baru ke dalam tiga elemen sebelumnya. Terdapat empat elemen yang menyebabkan *fraud* menurut *diamond theory* yaitu :

- a. Insentif atau tekanan, yaitu kebutuhan dan motivasi untuk berbuat *fraud*.
- b. Kesempatan, lemahnya sistem yang bisa dimanfaatkan.
- c. Rasionalisasi, risiko yang ada sebanding dengan *fraud* yang dilakukan.
- d. Kemampuan, yang dimiliki seseorang untuk dapat melakukan Tindakan *fraud*.





Gambar 2.2 *Diamond Fraud Theory* (Rafrini Amyulianthy, 2023)

Fraud Diamond menekankan bahwa kecurangan tidak hanya terjadi karena adanya tekanan, kesempatan, dan rasionalisasi, tetapi juga karena pelaku memiliki kemampuan untuk mengeksplorasi situasi dan menyembunyikan tindakannya

2.8 Celah Kecurangan (*fraud*)

Celah *fraud* terhadap pengendalian internal adalah potensi titik lemah dalam sistem pengendalian internal dalam organisasi yang memiliki potensi untuk disalahgunakan dalam rangka melakukan tindakan penipuan atau penyalahgunaan. Pengendalian internal bertujuan untuk memastikan integritas laporan keuangan, mencegah dan mendeteksi kesalahan atau kecurangan, dan melindungi aset perusahaan.

Namun, jika ada celah atau kekurangan dalam sistem tersebut, risiko kecurangan menjadi lebih tinggi. Contoh celah *fraud* yaitu kurangnya pemisahan tugas, kontrol akses yang lemah, dan dokumentasi atau rekam jejak yang tidak memadai. Untuk mengatasi celah-celah ini, perusahaan harus menerapkan pengendalian internal yang kuat, melakukan audit internal dan eksternal secara berkala, serta membangun budaya etika dan transparansi yang baik.

2.9 Gejala dan Penyebab *Fraud*

Pelaku *fraud* dapat diklasifikasikan ke dalam dua kelompok, yaitu manajemen dan pegawai karyawan. *Fraud* yang dilakukan oleh manajemen umumnya lebih sulit ditemukan dibandingkan dengan yang dilakukan oleh pegawai karyawan. Oleh karena itu, perlu diketahui gejala yang menunjukkan adanya *fraud* tersebut.

a. Gejala *fraud* manajemen :

- 1) Ketidak cocokan di antara manajemen puncak

- 2) Moral dan motivasi karyawan rendah
 - 3) Tingkat *complain* yang tinggi terhadap perusahaan dari pihak konsumen, pemasok, atau badan otoritas
 - 4) Terdapat kelebihan persediaan yang signifikan
- b. Gejala *fraud* pegawai :
- 1) Pengeluaran tanpa dokumen pendukung
 - 2) Kekurangan barang yang diterima
 - 3) Kemahalan barang yang dibeli
 - 4) Faktur ganda dan penggantian mutu barang
 - 5) Penghancuran, penghilangan, pengrusakan dokumen pendukung pembayaran.

2.10 Pengertian Audit

Audit sebagai serangkaian prosedur yang dilakukan secara terstruktur untuk mengumpulkan dan menganalisis bukti secara objektif terkait dengan berbagai klaim mengenai aktivitas atau kejadian ekonomi, dengan tujuan guna mengevaluasi kesesuaian klaim tersebut terhadap kriteria yang telah ditetapkan, serta menyampaikan temuan tersebut kepada berbagai pihak yang berkepentingan (Arens, Elder,& Beasley, 2017). Adapun tujuannya yaitu memberikan tingkat kepastian bahwa laporan keuangan atau sistem pengendalian internal suatu entitas sesuai dengan standar yang berlaku dan bebas dari kesalahan material ataupun penipuan.

Menurut Rezaee dan Riley (2010:133), kegiatan audit internal melibatkan penilaian terhadap efektivitas dan efisiensi operasional, memastikan kecukupan serta keberhasilan sistem pengendalian internal dalam mencapai sasaran organisasi, serta mengevaluasi proses penyusunan laporan keuangan untuk memastikan kualitas dan integritasnya. Adapun tujuannya agar informasi keuangan yang dihasilkan dapat dipercaya, relevan, transparan, dan bermanfaat dalam pengambilan keputusan.

Literatur sering menekankan pentingnya pembagian tugas untuk mencegah individu memiliki wewenang penuh yang dapat menyebabkan kecurangan. Pembagian tugas membantu memastikan bahwasanya tidak ada individu yang memiliki otoritas tunggal atau kendali penuh terhadap keseluruhan rangkaian transaksi. Lalu persetujuan dan otorisasi yang tepat untuk transaksi penting dalam pencegahan *fraud*. Hal ini termasuk pemeriksaan dan verifikasi transaksi oleh pihak yang berwenang sebelum disetujui dan diproses. Dan yang terakhir pengamanan fisik dan logis dari aset serta data, seperti kontrol akses dan enkripsi, penting untuk mencegah pencurian atau modifikasi informasi yang dapat menyebabkan kecurangan.



2.11 Lingkup Audit

Program audit harus menunjukkan lingkup (*scope*) pekerjaan audit, yaitu menjelaskan apa yang tercakup dalam audit dan tidak. Tujuan audit seharusnya dapat menuntun (*guidance*) lingkup pekerjaan audit. Tujuan utama dari sistem pengendalian internal (*internal control system*), untuk memastikan :

- a. Keandalan (*reliability*) dan integritas informasi.
- b. Ketaatan (*compliance*) dengan kebijakan (*policy*), rencana, prosedur, hukum dan regulasi.
- c. Pengamanan aktiva (*safeguard the asset*)
- d. Penggunaan sumber daya yang ekonomis dan efisien.
- e. Pencapaian tujuan dan sasaran yang ditetapkan untuk operasi dan program

2.12 Tahapan Dalam Proses Audit

- a. Merencanakan dan merancang pendekatan audit

Yang perlu diperhatikan adalah bahan bukti kompeten yang cukup serta pengendalian biaya. Perencanaan dan perancangan audit terdiri dari :

- 1) Mendapatkan pengetahuan atas bidang usaha klien.
- 2) Memahami struktur pengendalian intern klien dan menetapkan risiko pengendalian.

- b. Melakukan pengujian pengendalian dan transaksi

1) Pengujian atas pengendalian: pengujian keefektifan pengendalian untuk membenarkan tingkat risiko lebih rendah.

2) Pengujian atas transaksi: pemeriksaan atas dokumen-dokumen yang mendukung transaksi.

- c. Melaksanakan prosedur analitis dan pengujian terinci atas saldo

1) Prosedur analitis : digunakan untuk menetapkan kelayakan transaksi dan saldo secara keseluruhan.

2) Pengujian terinci atas saldo : prosedur khusus untuk menguji kekeliruan moneter dalam saldo-saldo laporan keuangan.

- d. Menyelesaikan audit dan menerbitkan laporan audit

Menggabungkan seluruh informasi yang didapat untuk memperoleh kesimpulan menyeluruh mengenai kewajaran penyajian laporan keuangan

2.13 Third Party atau Pihak Ketiga

Pihak ketiga adalah individu atau badan yang terlibat dalam transaksi tetapi bukan salah satu pelaku utama, dengan demikian mungkin memiliki kepentingan yang lebih rendah dalam transaksi tersebut. Agen penagihan dapat menjadi contoh lain dari pihak ketiga. Jika seorang debitur berutang sejumlah uang kepada kreditur dan belum melakukan pembayaran sesuai jadwal, kreditur kemungkinan akan menyewa agen penagihan untuk memastikan bahwa debitur menepati perjanjiannya.



2.14 Third Party Risk Management

Third Party Risk Management (TPRM) adalah proses manajemen risiko yang fokus pada identifikasi dan pengurangan risiko terkait penggunaan pihak ketiga seperti vendor, pemasok, mitra, kontraktor, atau penyedia layanan. TPRM dirancang untuk memberikan pemahaman menyeluruh tentang bagaimana pihak ketiga digunakan dan langkah-langkah pengamanan yang mereka miliki untuk melindungi data dan sistem.

TPRM melibatkan penilaian komprehensif terhadap keamanan dan kebijakan pihak ketiga, serta pemantauan berkelanjutan untuk memastikan kepatuhan terhadap standar keamanan yang telah ditetapkan. Proses ini mencakup identifikasi potensi kerentanan, audit keamanan, dan pemberian rekomendasi untuk perbaikan. Dengan TPRM, perusahaan dapat mengurangi risiko seperti kebocoran data, security breach, dan gangguan operasional, menciptakan lingkungan bisnis yang lebih aman dan terpercaya.

Risiko pihak ketiga adalah risiko yang dihadapi perusahaan akibat melibatkan pihak eksternal dalam ekosistem, infrastruktur, atau rantai pasokannya. Pihak ketiga meliputi vendor, pemasok, mitra, kontraktor, atau penyedia layanan yang memiliki akses ke data internal apa pun yang terkait dengan sistem, proses, kekayaan intelektual, informasi pelanggan, atau komunikasi internal.

Komponen Utama dalam TPRM:

a. Identifikasi Risiko

Menentukan semua potensi risiko yang mungkin timbul dari penggunaan pihak ketiga. Ini bisa termasuk risiko keamanan data, risiko operasional, risiko keuangan, risiko reputasi, dan risiko kepatuhan.

b. Penilaian Risiko

Mengevaluasi probabilitas dan dampak dari setiap risiko yang telah diidentifikasi. Ini bisa melibatkan penilaian risiko secara kualitatif (seperti skala rendah, sedang, tinggi) atau kuantitatif (dengan angka).

c. Mitigasi Risiko

Mengembangkan dan menerapkan langkah-langkah untuk mengurangi atau menghilangkan risiko. Ini bisa mencakup negosiasi ulang kontrak, implementasi kontrol keamanan tambahan, atau pengalihan risiko melalui asuransi.

d. Pemantauan dan Pelaporan

Terus memantau risiko yang terkait dengan pihak ketiga dan melaporkan hasilnya secara berkala kepada pemangku kepentingan yang relevan.

e. Uji Tuntas (*Due Diligence*)

Melakukan evaluasi mendalam terhadap pihak ketiga sebelum menjalin kerja sama, termasuk memeriksa riwayat, reputasi, dan kemampuan mereka untuk memenuhi persyaratan organisasi.

3. Metode Penelitian

Desain model kualitatif deskriptif digunakan untuk menggambarkan secara sistematis dan faktual mengenai kondisi pengendalian internal yang ada, serta menganalisis efektivitasnya dalam mendeteksi dan mencegah tindakan kecurangan. Dalam menentukan sumber data untuk kepentingan penelitian, peneliti mengolah data dari informan menggunakan teknis yang dikenal dengan sebutan teknik Purposive, metode pengumpulan data yang didasarkan pada tujuan atau pertimbangan tertentu dalam pemilihan sumber informasinya. Posisi strategis informan menjadi salah satu pertimbangan utama untuk mewakili data yang ingin peneliti dapatkan.

Sumber data primer merujuk pada sumber utama untuk memperoleh informasi langsung yang didapatkan melalui teknik pengumpulan data, baik secara lisan melalui wawancara. Dalam penelitian kali ini peneliti akan menggabungkan beberapa metode penelitian seperti autoetnografi, studi kasus, dan wawancara. Autoetnografi adalah metode penelitian yang kuat yang memungkinkan peneliti untuk menggabungkan pengalaman pribadi mereka dengan pemahaman budaya dan sosial yang lebih luas. Meskipun memiliki beberapa keterbatasan, autoetnografi dapat memberikan wawasan yang mendalam dan kaya tentang berbagai fenomena.

Selanjutnya menggunakan metode penelitian studi kasus, yaitu pendekatan penelitian yang mempelajari suatu kasus secara mendalam dan terperinci, baik pada individu, kelompok, organisasi, atau peristiwa tertentu. Tujuannya adalah untuk memahami secara komprehensif karakteristik, proses, atau fenomena yang terjadi dalam kasus tersebut. Penelitian studi kasus dengan menggunakan arsip melibatkan analisis mendalam terhadap dokumen atau catatan (arsip) untuk memahami suatu fenomena atau kasus tertentu.

4. Hasil dan Pembahasan

Setelah menjabarkan hal-hal yang melatarbelakangi penelitian, teori-teori yang telah mengukuhkan penelitian, dan metode penelitian yang digunakan, maka pada bab ini dipaparkan mengenai hasil dari penelitian. Hasil penelitian akan dijabarkan berdasarkan hasil wawancara, observasi dan dokumentasi. Pembahasan dalam bab ini didapat melalui hasil pengumpulan data melalui studi dokumentasi, observasi, wawancara terhadap informan yang dibutuhkan dalam penelitian, serta diskusi yang terfokuskan terhadap masalah yang diteliti. Pada bab hasil penelitian dan pembahasan ini, akan menguraikan berbagai hal mengenai hasil wawancara yang dilakukan di PT. XYZ terkait dengan Analisis Sistem Pengendalian Internal dan Audit Internal Dalam Upaya Pencegahan *Fraud* (Kecurangan).

4.1 Analisa Lingkungan Kerja dan Budaya Perusahaan

Analisis terhadap lingkungan pengendalian mengungkapkan bahwa PT. XYZ telah menunjukkan komitmen yang kuat terhadap integritas dan nilai-nilai etika. Hal ini tercermin dari adanya pemberitahuan berkala berupa peringatan anti *fraud* dan anti gratifikasi yang wajib dipahami dan dilaksanakan oleh seluruh karyawan, serta beberapa media gerakan anti-*fraud* seperti disediakannya tempat pengaduan jika terjadi hal-hal yang menjurus ke arah pelanggaran perilaku karyawan DC. PT. XYZ sejak dahulu menyatakan bahwa tidak akan menoleransi segala bentuk pelanggaran tindakan kecurangan dan akan memberikan sanksi tegas bagi pelanggar, termasuk pemberhentian kerja dan tuntutan hukum. Hasil pengamatan lingkungan kerja di PT. XYZ dan hasil wawancara dengan kedua informan menunjukkan bahwa level pemahaman terhadap kebijakan anti-*fraud* sudah cukup baik. Namun, di beberapa divisi perusahaan *third party* ditemukan bahwa masih ada gap dalam pemahaman prosedur pelaporan *fraud*, di mana masih terdapat beberapa karyawan merasa ragu untuk melaporkan indikasi fraud karena khawatir akan dampak karir dan hubungan mereka diluar tempat kerja.

4.2 Aktivitas Pengendalian dalam Pencegahan Fraud

Temuan penelitian menunjukkan bahwa PT. XYZ telah mengimplementasikan berbagai aktivitas pengendalian yang dirancang khusus untuk mencegah *fraud*. Aktivitas pengendalian utama meliputi pemisahan fungsi antar bagian, sistem persetujuan yang berjenjang, dokumentasi dan pencatatan yang memadai, pengamanan fisik aset, *performance review*, rekonsiliasi berkala, dan pembatasan akses untuk dokumen tertentu. Contoh dalam alur kerja administrator, dalam aspek pemisahan fungsi, fungsi penerimaan barang, pencatatan persediaan, dan pengeluaran kas telah dipisahkan dengan jelas dan tidak dipegang oleh orang yang sama dengan tujuan antar bagian bisa saling kroscek (*double crosscheck*) untuk menghindari risiko kesalahan atau tindakan *fraud*.

Sistem persetujuan berjenjang yang diterapkan menunjukkan efektivitas yang baik dalam mengontrol pengeluaran dan transaksi kritis. Contohnya di PT. XYZ memiliki sistem yang bernama *credit limit*, yaitu batas maksimal suatu toko memiliki hutang ke perusahaan. Dalam *credit limit* ini terdapat beberapa level *approver*, mulai dari tingkat satu dengan *approver branch controller*, tingkat dua dan tiga dengan *approver finance bussines*, dan terus naik sampai level *operation manager*.

4.3 Sistem Informasi dan Komunikasi

Analisis terhadap sistem informasi dan komunikasi mengungkapkan bahwa PT. XYZ telah menggunakan *Enterprise Resource Planning (ERP)*

system yang terintegrasi untuk mengelola seluruh proses bisnis. Sistem ini memungkinkan *real-time monitoring* terhadap transaksi dan menyediakan audit *trail* yang lengkap. Setiap transaksi yang ada kita bisa lacak siapa yang membuat atau menghapus atau bahkan mengubah datanya. Setiap transaksi dalam sistem memiliki *timestamp* dan *user identification* yang tidak dapat diubah, sehingga memudahkan proses investigasi jika terjadi *fraud*. Sistem ini juga dilengkapi dengan *user access control* yang ketat, di mana setiap user hanya dapat mengakses modul yang relevan dengan tugasnya.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa masih terdapat beberapa personel baru yang belum mendapatkan akses website ERP sehingga masih meminjam akun rekan yang lain. Hal ini dapat menjadi celah terjadinya *fraud* dan mengakibatkan kurangnya kekuatan investigasi jika terjadi *fraud* karena satu akun bisa dipakai oleh dua sampai empat orang.

Tapi disisi lain sistem pelaporan keuangan yang dihasilkan oleh ERP system telah meningkatkan akurasi dan kecepatan dalam deteksi anomali. Laporan harian yang dihasilkan secara otomatis memungkinkan manajemen untuk mengidentifikasi perbedaan antara target dan realisasi dengan cepat. Dengan sistem yang terintegrasi, kami dapat mengambil data apapun dalam waktu yang sangat singkat bahkan dalam hitungan menit, tidak seperti sistem manual. Namun, ditemukan bahwa masih ada ketergantungan pada laporan manual untuk beberapa proses, yang berpotensi menimbulkan error atau manipulasi.

4.4 Aktivitas Monitoring dan Evaluasi

Penelitian mengungkapkan bahwa PT. XYZ telah mengembangkan sistem *monitoring* yang komprehensif melalui kombinasi pemantauan berkelanjutan dan evaluasi berkala. Pemantauan berkelanjutan dilakukan melalui aktivitas rutin seperti rekonsiliasi *petty cash* harian oleh admin, rekonsiliasi bank oleh tim pusat, *stock opname* per enam bulan tapi diselingi dengan proses *cycle count* harian untuk menjaga akurasi stok, dan *review* transaksi bulanan dengan adanya laporan bulanan rutin. Sedangkan evaluasi berkala dilakukan tim pusat yang terjadwal setiap ada yang setiap minggu, setiap bulan, dan setiap tahun. Biasanya item yang di cek berupa dokumen *outstanding*, pemakaian dan pelaporan penggunaan uang panjer, penggunaan budget promo perbulan, penggunaan kode barang non jual serta pemakaian *tester*.

Hasil evaluasi menunjukkan bahwa sistem monitoring yang ada telah berhasil mengidentifikasi dan mencegah beberapa kasus potensial *fraud*. Sistem *monitoring* yang efektif tidak hanya mendeteksi *fraud* setelah terjadi, tetapi juga mencegah terjadinya *fraud* melalui efek *deterrent* yang diciptakan.

4.5 Tantangan dan Hambatan Implementasi



Meskipun sistem pengendalian internal yang ada menunjukkan efektivitas yang cukup baik, penelitian mengidentifikasi beberapa tantangan dan kelemahan yang perlu diatasi. Tantangan utama yang dihadapi adalah sulitnya melakukan perubahan dari sebagian karyawan yang menganggap prosedur pengendalian internal sebagai hambatan dalam efisiensi kerja. Hal ini mengindikasikan perlunya *balance* antara pengendalian dan efisiensi operasional. Disisi lain tim operasional khususnya administrator sering kali masih menemukan beberapa ketidakpatuhan dokumen yang dilakukan oleh divisi lain, misalnya dokumen hasil kirim terdapat beberapa yang belum di tanda tangan dan cap toko yang seharusnya kembali dalam keadaan lengkap, alhasil dokumen tersebut harus dikembalikan lagi ke toko untuk dimintakan cap dan tanda tangan. Jika saja driver melakukan kroscek hasil kirim di waktu yang sama ketika proses pengiriman, mungkin bisa di deteksi lebih awal dan di mintakan di hari yang sama.

4.6 Implikasi Praktis dan Rekomendasi

Berdasarkan hasil penelitian, terdapat beberapa implikasi praktis yang dapat diimplementasikan oleh perusahaan distribusi lainnya. Pertama, pentingnya mengembangkan *fraud risk assessment* yang spesifik untuk industri distribusi, mengingat karakteristik bisnis yang unik seperti volume transaksi tinggi, banyak *stakeholder*, dan kompleksitas *supply chain*. Kedua, perlunya investasi dalam teknologi IT yang dapat mendukung *real-time monitoring* dan sistem otomatis untuk meningkatkan efektivitas deteksi *fraud*. Ketiga, pentingnya mengembangkan budaya anti-*fraud* melalui program sosialisasi yang berkelanjutan dan sistem *reward* yang mendukung perilaku etis.

Rekomendasi untuk PT. XYZ meliputi percepatan pembuatan akun setiap personel baru agar tidak ada lagi pinjam-pinjam akun karyawan lain untuk memudahkan proses investigasi ketika di butuhkan, peningkatan durasi sosialisasi ke setiap divisi terkait SOP yang ada agar hal tersebut dapat menjadi fundamental dan tertanam di setiap personel, *deployment* dalam sistem IT untuk mengurangi gap dalam integrasi data, dan diadakannya lagi proses audit internal rutin ke setiap perusahaan agar lebih ke *tracking* alur selama periode tertentu.. Selain itu, disarankan untuk mengembangkan *key performance indicators* (KPI) yang spesifik untuk mengukur efektivitas sistem pengendalian internal, sehingga dapat dilakukan perbaikan berkelanjutan sesuai dengan misi PT. XYZ.

4. Kesimpulan dan Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan terhadap PT. XYZ mengenai analisis sistem pengendalian internal dan audit internal dalam upaya pencegahan *fraud*, dapat disimpulkan bahwa struktur organisasi perusahaan distribusi memiliki peran yang sangat krusial dalam menentukan efektivitas sistem pengendalian internal.

Struktur organisasi yang menerapkan prinsip *segregation of duties* dengan pemisahan fungsi yang jelas antara bagian operasional, keuangan, dan audit internal terbukti mampu mengurangi risiko *fraud* secara signifikan. Implementasi struktur organisasi yang hierarkis namun transparan dengan sistem pelaporan yang jelas telah memungkinkan PT. XYZ untuk menurunkan tingkat *fraud*.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan pengendalian internal tidak hanya bergantung pada design struktur organisasi semata, tetapi juga pada komitmen semua pihak dalam menciptakan tone at the top yang mendukung budaya anti-*fraud*. Struktur organisasi yang dilengkapi dengan unit audit internal yang independen dan melapor langsung kepada direktur utama terbukti efektif dalam mengidentifikasi dan mencegah potensi *fraud*. Selain itu, sistem otorisasi berjenjang yang terintegrasi dalam struktur organisasi telah memberikan kontribusi nyata dalam mengurangi risiko penyalahgunaan wewenang dan manipulasi transaksi. Dengan demikian, hipotesis penelitian yang menyatakan bahwa struktur organisasi yang baik dapat meningkatkan efektivitas pengendalian internal dalam pencegahan *fraud* terbukti valid dan dapat diterima.

5. Daftar Pustaka

- Atmadja, A. T., Dharmawan, N. A. S., & Saputra, K. A. K. (2024). Determinants of factors that affect accounting fraud in local government financial management. *Australasian Accounting, Business and Finance Journal*, 18(1), 45-62.
- Arens, A. A., Elder, R. J., & Beasley, M. S. (2017). *Auditing and Assurance Services: An Integrated Approach* (16th ed.). Boston: Pearson.
- Association of Certified Fraud Examiners (ACFE). (2024). Report to the Nations: 2024 Global Study on Occupational Fraud and Abuse. Austin, TX: ACFE.
- Atmadja, A. T., Dharmawan, N. A. S., & Saputra, K. A. K. (2024). Determinants of factors that affect accounting fraud in local government financial management. *Australasian Accounting, Business and Finance Journal*, 18(1), 45-62.
- Aurelia, P N, S M Dilliana, and ... 2022. "Pengaruh Audit Internal Dan Efektifitas Pengendalian Internal Terhadap Deteksi Fraud Pada Perumda Air Minum Wair Pu'an Kabupaten Sikka." *Co-Creation: Jurnal*
- Bedard, J. C., & Graham, L. (2014). Reporting on internal control. In *The Routledge Companion to Auditing* (pp. 128-142). Routledge.
- Biersteker, J. L., Brody, R. G., & Pacini, C. (2006). Accountants' perceptions regarding fraud detection and prevention methods. *Managerial Auditing Journal*, 21(5), 520-535.
- Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO). (2013). *Internal Control - Integrated Framework: Executive Summary*. Durham, NC: COSO.
- Cressey, D. R. (1953). *Other People's Money: A Study in the Social Psychology of Embezzlement*. Glencoe, IL: Free Press.
- Crowe Horwath LLP. (2011). Putting the freud in fraud: Why the fraud triangle is no



longer enough.

- Haridhy, F T, and M Mustakim. 2022. "Tanggung Jawab PT. TELKOMSEL Atas Kerugian Pelanggan Akibat Tindakan Pihak Ketiga Dalam Penyebaran Informasi Yang Menyesatkan (Suatu Tinjauan)" *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum*
- Hassan, S. W. U., Kiran, S., Gul, S., & Zainab, B. (2025). The perception of accountants/auditors on the role of corporate governance and information technology in fraud detection and prevention. *Journal of Financial Reporting and Accounting*, 23(1), 78-95.
- Ilias, A., Baidi, N., Ghani, E. K., & Omonov, A. (2024). Examining government officials' perceived risk management and internal control in combating fraud in the public sector. *Edelweiss Applied Science and Technology*, 8(2), 234-251.
- Kuntadi, C, B A Puspita, and A Taufik. 2022. "Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Pencegahan Kecurangan: Sistem Pengendalian Internal, Kompetensi Sumber Daya Manusia, Kesesuaian Kompensasi." *Jurnal Ekonomi Manajemen Sistem*
- Lastri, S., Fahlevi, H., Diantimala, Y., & Ridwan. (2022). Mediation role of management commitment on improving fraud prevention in primary healthcare: Empirical evidence from Indonesia. *Problems and Perspectives in Management*, 20(3), 456-468.
- Lubis, H. Z., Sari, M., Ramadhany, A. A., & Brutu, I. R. (2024). Effect of internal audit, internal control, and audit quality on fraud prevention: Evidence from the public sector in Indonesia. *Problems and Perspectives in Management*, 22(1), 123-135.
- Meiryani, Fitriani, N. A., & Habib, M. M. (2019). Can information technology and good corporate governance be used by internal control for fraud prevention? *International Journal of Recent Technology and Engineering*, 8(3), 2847-2852.
- Nugroho, D H, and Z Afifi. 2022. "Pengaruh Pengendalian Internal Dan Good Corporate Governance Terhadap Pencegahan Fraud." ... *Journal: Indonesian Journal*
- Nyakarimi, S. N., Kariuki, S. N., & Kariuki, P. W. (2020). Application of internal control system in fraud prevention in banking sector. *International Journal of Scientific and Technology Research*, 9(4), 1478-1485.
- O'Leary, C., Iselin, E., & Sharma, D. (2006). The relative effects of elements of internal control on auditors' evaluations of internal control. *Pacific Accounting Review*, 18(2), 69-96.
- Rustandy, T, C Sukmadilaga, and ... 2020. "Pencegahan Fraud Melalui Budaya Organisasi, Good Corporate Governance Dan Pengendalian Internal." ... *Pendidikan Akuntansi &*
- Špiler, M., Knežević, S., Milojević, S., & Šebek, V. (2024). Does the internal control system play a strong safeguarding role against fraud in local communities? *Lex Localis*, 22(3), 567-588.
- Sudarman, M F, S Saharuddin, and ... 2024. "Optimalisasi Jaminan: Pemindahan Tanggung Jawab Ke Pihak Ketiga." *Jurnal Litigasi*
- Sudarmanto, E. 2020. "Manajemen Risiko: Deteksi Dini Upaya Pencegahan Fraud." *Jurnal Ilmu Manajemen*.
- Suh, J. B., Nicolaides, R., & Trafford, R. (2019). The effects of reducing opportunity



- and fraud risk factors on the occurrence of occupational fraud in financial institutions. International Journal of Law, Crime and Justice, 59, 100-115.
- Sumiati, C, and N Nur'aeni. 2022. "Peran Manajemen Risiko Dan Pengendalian Internal Dalam Meningkatkan Kinerja Karyawan Di Bank BJB Syariah KCP Majalaya." *Jurnal Dimamu*.
- Taufik, T. (2019). The effect of internal control system implementation in realizing good governance and its impact on fraud prevention. International Journal of Scientific and Technology Research, 8(11), 2405-2410.
- Wolfe, D. T., & Hermanson, D. R. (2004). The fraud diamond: Considering the four elements of fraud. The CPA Journal, 74(12), 38-42.

